

PENDEKATAN STRATEGIS  
ADAPTIF BERBASIS SJSN (BPJS)  
DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN PRODUK  
PENSIUN NASIONAL

*by --*

---

**Submission date:** 13-May-2024 01:16PM (UTC+0500)

**Submission ID:** 2378092221

**File name:** Jurnal\_BPJS.pdf (537.29K)

**Word count:** 3590

**Character count:** 22605

# **PENDEKATAN STRATEGIS ADAPTIF BERBASIS SJSN (BPJS) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PRODUK PENSIUN NASIONAL**

**Yuliyanti M. Manan**

**Universitas Islam Raden Rahmat Malang**

**e-mail (yuliyantim2@gmail.com)**

## **ABSTRACT**

*The Capital Market Industry and Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) provide alternative means of investment and financial planning for the public. Funds collected in the capital market and the non-bank financial industry (IKNB) and the movement of funds through the financial markets, including capital markets and non-bank financial institutions, are the main keys to the movement of a country's economy. The ranking of penetration results from the World Bank in 6 Asian countries Indonesia ranks 6th, in order to increase penetration, an adaptive approach based on the National Social Security System (BPJS) is needed, in this case placing the role of the National Health Insurance as a center for developing a national pension program with the strategy of integrating the health benefits of Social Security Health Insurance, and pension services (BPJS-K & P). The purpose of this research is to analyze and study innovation solutions to the development and derivation platform of pension products based on the BPJS program. This study uses a descriptive analytical research design and an actuarial approach to research and develop BPJS-based pension services programs.*

**Keywords: Adaptive Strategy, SJSN, BPJS, Pension Services.**

## **ABSTRAK**

Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan sarana investasi alternatif dan perencanaan keuangan untuk publik. Dana yang dikumpulkan di pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) dan pergerakan dana melalui pasar keuangan, termasuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, adalah kunci utama pergerakan ekonomi suatu negara. Pemeringkatan hasil penetrasi dari Bank Dunia di 6 negara Asia Indonesia menempati urutan keenam, untuk meningkatkan penetrasi, diperlukan pendekatan adaptif berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS), dalam hal ini menempatkan peran Asuransi Kesehatan Nasional, sebagai pusat pengembangan program pensiun nasional dengan strategi mengintegrasikan manfaat kesehatan dari Jaminan Kesehatan Jaminan Sosial, dan layanan pensiun (BPJS-K & P). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari solusi inovasi untuk platform pengembangan dan derivasi produk pensiun berdasarkan program BPJS. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik deskriptif dan pendekatan aktuarial untuk meneliti dan mengembangkan program layanan pensiun berbasis BPJS.

**Kata kunci: Strategi Adaptif, SJSN, BPJS, Layanan Pensiun.**

## **PENDAHULUAN**

Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank menyediakan alternatif sarana investasi dan perencanaan keuangan bagi masyarakat. Dana yang dihimpun di pasar modal dan Industri keuangan

non-bank (IKNB) selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dana bagi operasional dan pengembangan usaha perusahaan/rumah tangga yang membutuhkannya. Pergerakan dana melalui pasar keuangan, termasuk

pasar modal dan lembaga keuangan non bank adalah kunci utama pergerakan perekonomian suatu negara.

Sampai saat ini, tingkat partisipasi masyarakat di industri keuangan non bank terutama pada sektor industri dana pensiun masih sangat rendah. Berdasarkan data statistik OJK yang belum diauditisasi kapitalisasi industri dana pensiun semester akhir 2013 menunjukkan tingkat penetrasi sebesar 5,66% dari total tenaga kerja, angka ini menunjukkan trend positif, naik dari tahun 2011 yaitu 5,06%. tetapi hasil ini sangat belum memuaskan, menurut data World Bank, Ratio jumlah tenaga formal yang tercover dana pensiun dengan usia produktif bekerja, negara Indonesia hanya diatas 10% jauh lebih rendah dibanding negara tetangga terdekat kita yaitu Malaysia dengan ratio diatas 50%, sehingga menempatkan Indonesia diranking paling bawah dari 6 negara Asia. Hal ini menjadi sebuah prioritas yang sangat urgent karena tingkat utilitas yang sangat rendah dari sektor dana pensiun akan menimbulkan banyak problematika mendasar di masa depan dan memerlukan sebuah piranti sistem dengan pertimbangan makro ekonomi yang holistik, berkesinambungan, sistemik dan tentunya berkeadilan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan nasional

David Collinson (2001), membuat pemetaan dan design analisis perbandingan metode asumsi aktuarial dalam valuasi program pensiun nasional di uni eropa, dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa perencanaan dalam tata kelola program pensiun nasional, di tiap-tiap negara di uni eropa memiliki unifikasi dan sistem yang berbeda, baik dari segi jenis manfaat asuransinya (*defined benefit* & *defined contribution*), benefitas provisi secara nasional, struktur perpajakan dan pengawasan (*The taxation and supervisory framework*), sistem

promosi dan edukasi yang mumpuni dan berdampak luas serta evolusi sistem tata kelola internal manajemen dalam industri asuransi yang mengacu kepada *Good Management System*, hal ini didasarkan oleh banyak aspek; dari segi usia populasi, distribusi pekerja antara sektor formal dan informal, PDB, tingkat inflasi dan status ekonomi nasional serta pertimbangan kemanfaatan lainnya. Hal ini menunjukkan sistem dana pensiun harus bisa berevolusi dan memiliki fleksibilitas-adaptif, terhadap segala perubahan, dan akurasi yang tepat dalam setiap kebijakan dan regulasi serta memiliki instrumen solvabilitas terhadap segala permasalahan yang terjadi (Harlow 2019).

Upaya diversitas dalam industri jaminan sosial merupakan sebuah langkah strategis yang sangat logis untuk meningkatkan cakupan dan tingkat penetrasi terutama dengan merevitalisasi industri jaminan sosial terutama pada bidang jaminan pensiun untuk *high increase penetration for retirement fund* (Kintzel, 2019). Pemerintah pada Tahun 2012 telah meluncurkan sebuah program penjaminan sosial yang mendasar bagi masyarakat yang dikenal dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), berdasarkan amanat undang-undang 40 tahun 2004 tentang penjaminan pada 4 aspek hak yang mendasar bagi masyarakat yaitu ; penjaminan dan proteksi kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan terbitnya undang-undang SJSN seluruh proteksi dan penjaminan sosial dari 4 variabel tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini secara sentralisasi berada dalam sistem pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan oleh Pemerintah pusat (*Central Government*).

Secara struktur institusional implementasi dari SJSN melahirkan sebuah badan pengelola nirlaba yang independen dikenal dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), secara historis BPJS sebenarnya bukan institusi baru karena afiliasi institusi yang bergerak pada sektor jaminan dibawah naungan BUMN yang telah berpengalaman dibidang jaminan kesehatan dan dana pensiun selama kurun waktu 40 tahun diantaranya PT. Askes dan PT Jamsostek, konsep assimilate integrate menjadi 2 Badan yang penyelenggaraannya terfokus pada bidang kesehatan dengan BPJS Kesehatan (BPJS-K) dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-KT) (Raharjo, 2016)

Dengan dasar fundamental diatas dalam peningkatan dana pensiun adalah bagaimana membangun konstruksi industri dana pensiun terkait dengan program BPJS dari sisi cakupan target pekerja pada sektor informal yang semuanya akan tercover pada BPJS-K (melalui kebijakan pemerintah) dengan asumsi pendapatan upah yang tergolong kecil, melalui pendekatan strategis adaptif yang tetap mengacu kepada amanat UU SJSN dengan mengedepankan asas kesejahteraan dan sosial yang merata.

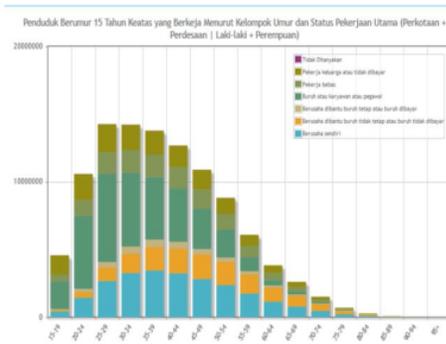
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitis dengan konstruksi pembahasan berdasarkan pendekatan aktuarial yang bertujuan untuk meneliti dan mengembangkan dan membuat kajian solusi inovasi terhadap platform pengembangan dan derivasi produk pensiun berbasis program BPJS. Rancangan analisis dan pengumpulan data menggunakan studi literatur berupa referensi jurnal penelitian dan hasil hasil penelitian, text book references, dan sumber laporan yang terkait tentang kajian produk dan pengembangan program pensiun.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

BPJS sebagai leader dan authorized dealer jaminan sosial secara nasional memiliki tingkat kepesertaan yang sangat besar dengan jumlah peserta untuk BPJS Kesehatan sekitar 147,268,467 peserta (update data tanggal 26/06/2015) sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan sekitar 12,743,745 peserta (real data tanggal Nov.2014), angka ini cukup besar terutama capaian kepesertaan dalam BPJS kesehatan (61,9 % dari total populasi), sedangkan capaian kepesertaan dari BPJS-KT sekitar 87,23% (secara nasional) untuk dana pensiun pada sektor formal. Probabilitas untuk meningkatkan penetrasi pada sektor dana pensiun salah satunya dengan meningkatkan proyeksi penggiur pada sektor tenaga kerja informal.

Menurut Michtel Wenner (2008), mengasumsikan bahwa kemanfaatan pensiun akan diterima secara maksimal jika cut off masa waktu aktif penggiur adalah 30-35 tahun dengan usia pensiun adalah 60 tahun berdasarkan skema piramida penduduk intermediate/menengah, sedangkan hasil analisis jumlah penduduk indonesia berdasarkan perhitungan SMAM (*Singulate Mean Age at Marriage*) median usia indonesia berkisar di usia 25,7 th (*Intermediate category*). berarti proyeksi penggiur aktif adalah minimal usia 25 tahun sudah harus tercover menjadi peserta dana pensiun. sebagai asumsi berdasarkan analisis data BPS (2010) terkait tentang mapping distribusi ketenagakerjaan).



Grafik distribusi penduduk 15 Tahun yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama (desa+kota/laki+perempuan)

Data diatas menunjukkan bahwa usia produktif untuk pengiur (dengan menggunakan cut off usia anantara 25-60 th) untuk pekerja sektor informal dengan kriteria pekerja keluarga/tidak dibayar, bekerja sendiri, pekerja bebas, buruh tetap dan buruh tidak tetap, total kumulatif adalah sebesar 54,093,112 penduduk, sebuah angka cakupan untuk calon peserta dana pensiun yang sangat besar. Dan tentunya kebijakan strategis pemerintah dalam melaksanakan undang-undang SJSN yang mana akan memberikan proteksi secara keseluruhan kepada warganya untuk berpartisipasi aktif menjadi peserta BPJS, maka sektor informal secara tidak langsung akan merasakan manfaat dari keikutsertaan BPJS.

Menurut Kuncoro Pribadi (2019) Untuk mengetahui perkiraan dan manfaat dari dana pensiun, diperlukan data tentang perkiraan Upah rata-rata pekerja baik pada sektor formal ataupun informal, menurut data BPS (2007) , data rata-rata upah adalah sebagai berikut :

|                              | Professional | Managerial | Clerical Worker | Sales Worker | Service Provider | Agricultural Worker | Production Operator/Laborer | Other     |
|------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. Wiraswasta                | 1,171,755    | 2,917,261  | 836,136         | 772,742      | 637,639          | 462,251             | 602,246                     |           |
| 2. Wiraswasta dan keluarga   | 0            | 0          | 0               | 0            | 0                | 0                   | 0                           |           |
| 3. Usaha kecil               | 0            | 0          | 0               | 0            | 0                | 0                   | 0                           |           |
| 4. Pekerja                   | 1,442,270    | 4,405,180  | 1,398,190       | 884,884      | 702,419          | 691,300             | 888,313                     | 1,919,227 |
| 5. Pertanian skala kecil     |              |            |                 |              |                  | 373,034             |                             |           |
| 6. Non pertanian skala kecil | 816,502      |            | 888,770         | 531,919      | 451,776          |                     | 609,657                     |           |
| 7. Pekerja sukarela          | 0            | 0          | 0               | 0            | 0                | 0                   | 0                           | 0         |

Tabel 1. Data upah pekerja berdasarkan profesi

Kemudian akhirnya digunakan rata-rata upah dan informasi hasil perhitungan untuk menghitung upah rata-rata pekerja sektor formal dan informal untuk setiap kategori tenaga kerja. Hasil dari perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Kategori 2, 3 dan 7 diabaikan dalam perhitungan karena data rata-rata upah tidak tersedia

|                              | Total     | Formal    | Informal |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. Wiraswasta                | 638,656   | 1,156,481 | 630,474  |
| 2. Wiraswasta dan keluarga   |           |           |          |
| 3. Usaha kecil               |           |           |          |
| 4. Pekerja                   | 1,049,222 | 1,049,222 | 0        |
| 5. Pertanian skala kecil     | 373,034   | 0         | 373,034  |
| 6. Non pertanian skala kecil | 592,755   | 832,708   | 588,029  |
| 7. Pekerja sukarela          |           |           |          |
| Total                        | 802,130   | 1,049,710 | 568,271  |

Tabel 2. Data upah berdasarkan sektor formal dan informal

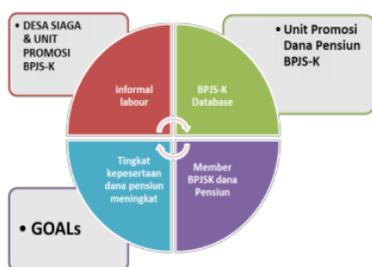
Dari data tabel 2. Terlihat bahwa rata-rata upah pada tingkat formal dan informal jika dikalikan dengan jumlah pekerja dan dibagi PDB maka hasilnya mendekati angka 22%, jika dibandingkan dengan standar ILO (International Labour Organization ) sangat kecil karena batas standar upah nasional harus minimal berkontribusi pendapatan PDB sebesar 35 %, maka dengan pendekatan dari pendapatan upah perlu mendapat perhatian kedepan terkait kebijakan UMR, dan perhatian pada sektor informal terutama dalam kaitannya krisis inflasi di indonesia yang pada saat ini angka pengangguran bergerak naik secara progresif.

**Strategi Adaptif Berbasis SJSN (BPJS) Dalam Upaya Peningkatan Program Pensiun Nasional**

Strategi adaptif dalam hal ini adalah memaksimalkan peranan BPJS sebagai sentra badan penjaminan Sosial terutama dalam bidang kesehatan dan dana pensiun dalam 2 pendekatan strategis;

1. Pendekatan dari sisi manajemen BPJS-K, pendekatan ini adalah menjadikan BPJS-K integrated dengan fungsi yang baru menjadi BPJS-Kesehatan&Pensiun (BPJS-K&P/ with pension services).
2. Pendekatan dari sisi promosi dan edukasi berbasis Faskes tingkat I (Fasilitas Kesehatan Tingkat I/Puskesmas) dengan konsep desa siaga, dan unit promosi dan literasi dana pensiun.

Gambaran design strategi adaptif dari 2 pendekatan diatas adalah sebagai berikut :



Dari gambaran strategi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

**A. Pendekatan dengan mengintegrasikan BPJS-K menjadi BPJS-K&P (dengan dana pensiun), memiliki 3 aspek benefit;**

- Aspek benefit dari jumlah peserta yang besar, hal ini terkait dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua warga untuk ikut menjadi peserta BPJS, sehingga peluang ketercukupan dan kepesertaan dana pensiun peserta dari sektor pekerja informal (sekitar 65% lebih banyak dibanding jumlah pekerja sektor formal) juga besar, kebijakan

dana pensiun berbasis BPJS adalah mengcover proteksi dana pensiun dasar, dengan besaran iuran pensiun yang disesuaikan.

- Aspek *Automatically Upgrade By User Approval*, konsep ini akan memungkinkan peserta BPJS-K menjadi BPJS-K&P ketika peserta setuju untuk tercover dalam program BPJS-K&P tentunya dengan penambahan biaya iuran disamping iuran asuransi kesehatan dasar (tentunya diperlukan perhitungan aktuarial yang teliti dalam menentukan besaran iuran)
- Aspek identitas peserta dan manajemen database (*management database system*) yang valid dan menggunakan satu akun BPJS-K, hal ini menjadi penting karena tata kelola manajemen database dalam satu akun akan sangat memudahkan dalam kontrol, validasi, serta proses pengelolaan dalam manajemen data.

Untuk menunjang konsep BPJS-K&P yang paripurna, model pendanaan dan sistem tatakelola BPJS-K&P harus berubah dari nirlaba menjadi partially benefit, Data LAN (2011) menunjukkan konsep pembiayaan dana pensiun pada sektor formal pemerintah (PNS-ABRI melalui PT.Taspen dan PT.ASABRI) masih bersifat pembayaran manfaat *pay as you go*, yang menitikberatkan pada pembiayaan APBN meskipun bentuknya DPPK, artinya pemerintah tidak memberikan bantuan ataupun partisipasi iuran hanya mengalokasikan melalui dana APBN sehingga dana iuran yang dikumpulkan dengan manfaat yang diterima cukup tinggi artinya besaran iuran lebih kecil dibanding pembayaran manfaat pensiun yang didapat hal ini akan menjadikan beban APBN setiap tahun semakin

meningkat, sehingga perlu dibuat skema pendanaan khusus dengan konsep *partially benefit*. Dari bentuk skema tersebut, pemerintah selaku pemberi manfaat dana pensiun harus memberikan kontribusi iuran yang dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria yang sesuai dengan kondisi finansial nasional, dan hasil pembayaran iuran peserta pensiun dan dana iuran dari pemerintah dikumpulkan dan diinvestasikan pada sektor-sektor strategis yang bersifat conditional risk (artinya tidak terlalu beresiko High Risk ataupun low risk) untuk itu diperlukan pelaku investasi dari swasta yang kredibel dan memiliki reputasi yang baik hal ini sesuai dengan good management system, pemerintah juga harus memiliki dana cadangan sebagai ganti jika ada skenario pembayaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Konsep bentuk pembayaran manfaat pensiun dari BPJS-K adalah *partially funded* produk dana pensiun manfaat pasti (*defined benefit*), dengan besaran iuran pensiun yang disesuaikan dengan upah pendapatan, untuk hal ini ada beberapa parameter pendaftaran peserta agar sesuai dengan pembayaran manfaat pensiun dengan usia pensiun 60 tahun adalah:

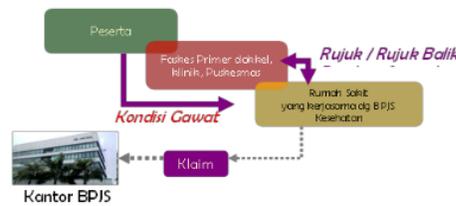
- Membuat cut off usia untuk peserta pengiur minimal usia 25 tahun dan maksimal 35 tahun (agar mendapat manfaat pensiun yang utuh)
- Jika usia peserta pensiun > 55 tahun maka pembayaran manfaat hanya berupa pengembalian uang iuran dan bagi hasil usaha.

Dengan konsep BPJS-K diatas diharapkan ketercakupan dan kepesertaan dan keberlangsungan program akan berjalan secara sistemik dan berkesinambungan secara maksimal serta membawa

hasil manfaat yang paripurna yaitu dengan visi “Masa Muda Sehat Masa Tua Aman”.

### B. Pendekatan dari sisi promosi dan edukasi berbasis Faskes tingkat I (Fasilitas Kesehatan Tingkat I/Puskesmas) dengan konsep Desa siaga, dan unit promosi dan literasi dana pensiun.\

BPJS-K memiliki standar alur operasional rujukan secara berjenjang, artinya bahwa setiap peserta BPJS-K harus mengikuti standar layanan rujukan yang berlaku dengan alur seperti dibawah ini :



Gambar 2. Alur pelayanan BPJS-K

Dari bagan diatas dijelaskan bahwa peserta harus mengikuti alur pelayanan berjenjang dari Faskes primer (Puskesmas dll), jika tidak mampu dalam tahapan pengobatan maka dirujuk ulang ke Rumah sakit yang telah menjadi partner BPJS-K, sehingga peserta tidak dapat secara langsung berobat ke Rumah Sakit harus melalui skrening dan pengobatan di Faskes primer (Puskesmas). Dengan melihat alur operasional BPJS diatas, Puskesmas adalah pintu gerbang utama (primary gate) dalam pelayanan BPJS, dan merupakan unit layanan primer dalam proses rujukan kesehatan di BPJS-K, dengan jumlah yang banyak dan tersebar dengan merata diseluruh propinsi di indonesia maka proses pelayanan dan rujukan akan terlayani dengan baik, serta saat ini sistem data base BPJS-K telah terintegrasi secara online dengan sistem pelayanan diseluruh faskes BPJS-K baik primer maupun RS rujukan.

Dengan konsep sinergi BPJS-K&P calon peserta yang belum mengupgrade kepesertaan menjadi BPJS-K&P akan dilayani dalam pemberian informasi untuk literasi dan promosi benefit dari program BPJS-K&P, hal ini sangat mudah karena setiap puskesmas ada satu unit pelayanan dan pengaduan BPJS-K, sehingga proses edukasi dan promosi bisa berjalan secara sistematis dan berdampak luas. Dengan jumlah faskes primer (Puskesmas) sekitar 9808 unit Puskesmas merupakan sebuah analogi unit dana pensiun dengan pola informasi, sistem operasional yang sama, artinya percepatan target upgrade kepesertaan dari BPJS-K ke BPJS-K&P berlangsung secara cepat dan efektif.

Konsep promosi pada unit BPJS-K&P di tingkat Puskesmas diperlukan beberapa metode, instrumen dan media promosi yang interaktif seperti

- simulasi online dalam memberikan nilai manfaat pensiun berdasarkan masa aktif pengiur, hal ini akan membuka pola promosi yang efektif secara aktuarial tanpa memerlukan personal aktuaris (karena personel di unit BPJS-K tingkat Puskesmas memiliki stratifikasi pendidikan minimal D-III) sehingga proses coping informasi, dan edukasi promotif berjalan sesuai dengan maksud yang diinginkan.
- Pola Pelatihan berbasis TOT (*Training of trainer*), sebagai kader promosi dan literate dengan model aktuarial sederhana
- Perlengkapan media penyuluhan baik elektronik, cetak yang mudah dalam penggunaannya dalam penyajian dan pemberian informasi dengan konsep *present-future open mind*

Konsep edukasi dan promosi berbasis Desa Siaga (sebuah pola pembinaan terpadu antara Puskesmas dan masyarakat desa, adalah pola pembinaan yang telah dilakukan secara nasional dengan menitikberatkan pada kerjasam lintas sektoral desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang aware dengan kesehatan, ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan (Kepmenkes, 2010).

Desa siaga ini memiliki sebuah pola dan fungsi yang sangat diunggulkan dalam target keberhasilan program salah satunya program kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kaitan konsep desa siaga dalam meningkatkan kepesertaan BPJS-K&P adalah melalui kegiatan promosi berkelompok dengan melibatkan perangkat desa dan stakeholder setempat (kecamatan) dengan melakukan upaya promosi pentingnya program BPJS-K&P, hal ini sangat relevan dengan model operasional desa siaga ;

- Desa Siaga memiliki jadwal pelaksanaan yang tersusun dan terencana dengan baik
- Memiliki instrumen penilaian yang baku (sesuai Permenkes No.75 tahun 2004)
- Memiliki perangkat tim independen dengan support dan pembinaan dengan stake holder terkait
- Aspek dana operasional yang sudah tercover dalam penyusunan anggaran operasional desa, sehingga upaya promosi berjalan dengan cepat dan ekonomis karena tidak memerlukan biaya operasional dan pelaksanaannya.
- Motivasi masyarakat yang tinggi untuk mengikutinya karena ada semacam pemicuan yang berbasis penilaian pada tingkat desa, sehingga dengan menggunakan teknik *psychological promoting* yang

menitikberatkan agar mereka ikut untuk menjadi peserta BPJS-K&P

Dampak inovasi yang diharapkan dari model program ini adalah;

- a) Terciptanya sistem jaringan promosi dan edukasi yang merata tentang pentingnya mengikuti dan menjadi peserta BPJS-K&P secara massif, konstruktif dengan menitikberatkan Puskesmas dalam hal ini unit BPJS-Kesehatan sebagai sentral inovasi. Hal ini relevan karena Puskesmas adalah sentra fasilitas kesehatan Primer pada sistem rujukan BPJS-K&P dengan jumlah hampir 10.000 unit dan tersebar merata di 33 propinsi dan terkoneksi secara online dalam sistem pelayanannya. Hal ini memberikan keuntungan langsung berupa upaya promotif yang efisien, sistematis dan berkesinambungan.
- b) Tingkat penetrasi yang tinggi, karena dengan jumlah peserta BPJS-K yang besar (65% dari total populasi) dan jumlah pekerja pada sektor informal yang tinggi dibanding jumlah pekerja formal yang tercover dana pensiun oleh industri pensiun, ketika kelompok pekerja informal mengupgrade kepesertaannya ke BPJS-K&P maka secara statistik tingkat penetrasi meningkat signifikan.
- c) Tersedianya ruang fiskal yang besar karena sistem pendanaan jaminan Sosial Nasional tidak menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan pola sistem partial funded dengan melibatkan pemerintah sebagai salah satu pembayar iuran peserta, dan melibatkan pihak swasta untuk mengelola dana iuran

pensiun secara profesional, transparan dan bermanfaat untuk kesejahteraan sosial sesuai konsep aktuarial modern yang berbasis good management system

- d) Tingkat ketercakupan populasi masyarakat pedesaan yang minim tercover dana jaminan sosial terutama dana pensiun melalui BPJS-K&P menjadi tinggi karena basis promosi dan edukasi pada pemanfaatan media Desa Siaga dengan basis masyarakat pedesaan.

## KESIMPULAN

Peluang replikasi dari program strategi adaptif berbasis SJSN (BPJS) terhadap upaya peningkatan program pensiun nasional adalah sebagai berikut :

- Program ini adalah Program Nasional dengan menitikberatkan pada BPJS sebagai subjek program, Sesuai dengan amanat UU SJSN bahwa di tahun 2019 semua masyarakat indonesia Wajib mengikuti program BPJS-Kesehatan, dengan ketentuan dan kebijakan diatas peluang replikatif sangat mungkin terjadi dengan konsep promosi dan edukasi berbasis BPJS-K di tingkat unit Puskesmas, untuk upgrade kepesertaan dari peserta BPJS-K menjadi BPJS-K&P (kesehatan dan pensiun) akan terbuka lebar dan peluang keberhasilan sangat tinggi
- Mempunyai standar sistem pelayanan yang sama Program BPJS-K&P dengan unit BPJS tingkat Puskesmas sebagai sentra inovasi dengan sebaran yang merata dan berjumlah hampir 10.000 unit diseluruh propinsi di Indonesia merupakan unit promosi yang efektif dan berimplikasi nasional. Dengan sistem promosi dan edukasi tentang dana

pensiun dalam hal ini BPJS-K&P yang tertata dengan baik dan manajemen pelayanan yang sama dengan sistem online membuka peluang replikasi dengan tingkat kemungkinan sangat tinggi.

- Program berbasis masyarakat dan eksistensi berkelanjutan, Program ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan desa siaga dengan regulasi dan tata kelola yang sistematis, menjadikan inovasi dengan basis masyarakat ini mampu eksis dan berkelanjutan dalam range waktu yang lama serta dukungan stake holder setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2010). Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 2004 - 2014\*); <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/971>
- Collinson david. 2001. *Actuarial Methods and Assumption used in the Valuation of Retirement Benefit in the UE and other European countries*. Groupe Consultatif Acturriel Europeen (European Acturial Consultative Group) : hal 1-3
- Dale Kintzel. 2019. *Income Sustainability in Retirement: A Case Study of the Life-Cycle Account*. The Journal of Retirement Winter 2020, jor.2019.1.059; DOI: <https://doi.org/10.3905/jor.2019.1.059>
- Fundamentals of Current Pension Funding and Accounting For Private Sector Pension Plans*. American Academy of Actuaries : hal 1-4
- Haryo Pribadi Kuncoro, Pratiwi Annisa,2019. *Penggunaan Perhitungan Past Service Liability (PSL) Dalam Dana Pensiun Di DPLK BRI*. Jurnal Sosial Humaniora Terapan. Volume 1 No.2, Januari-Juni 2019
- Kepmenkes No.1529.2010. Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2010
- Sulistyo Agustinus.2012. *Bom Waktu Penyelenggaraan Sistem pensiun PNS di Indonesia*. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber daya aparatur Negara LAN : hal 9-10
- Wiener Mitchel *White Paper SJSN*. Departemen Keuangan Republik Indonesia bekerjasama dengan ADB : hal 56-57
- W. V. Harlow, Keith C. Brown and Stephen E. Jenks.2019. *The Use and Value of Financial Advice for Retirement Planning*. The Journal of Retirement Winter 2020, jor.2019.1.060; DOI: <https://doi.org/10.3905/jor.2019.1.060>
- Raharjo AW, Elida T. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia. UI Press. Jakarta.



# PENDEKATAN STRATEGIS ADAPTIF BERBASIS SJSN (BPJS) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PRODUK PENSIUN NASIONAL

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

12%

★ [garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On